

Staf Sekjen PDIP Kecewa, Praperadilan Ditunda

JAKARTA (KR) - Sidang praperadilan yang diajukan staf Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Kusnadi, melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditunda. Hal ini, menurut hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan Samuel Ginting, karena pihak KPK tidak hadir dalam persidangan dengan alasan sedang meng-hadiri persidangan praperadilan dalam perkara lain.

Selain itu, Hakim Samuel Ginting dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Senin (24/3) mengungkapkan, KPK me-

minta sidang dapat digelar kembali pada Senin (14/4). Namun, hakim memutuskan persidangan kembali digelar Selasa (8/4).

Dengan demikian, lanjut hakim, PN Jakarta Selatan bakal kembali memanggil KPK setelah lebaran. “Baik, kita tunda persidangan ini ke hari Selasa 8 April 2025 pukul 10.00 memanggil termohon yaitu KPK dengan panggilan ini, panggilan kedua dan terakhir,” tutur hakim Samuel Ginting.

Dengan adanya penundaan tersebut, kuasa hukum Kusnadi, Johannes O Tobing menyampaikan kekecewaannya. Ia bahkan memandang, alasan KPK tidak

hadir dalam persidangan kali ini tak beralasan. Johannes yang didampingi tim kuasa hukum lainnya, Army Mulyanto dan tim menyatakan kecewa.

Padahal, lanjutnya, perkara yang diajukan Kusnadi ini bukanlah perkara baru. Sebab, perkara ini sudah bergulir satu tahun lamanya. Untuk itu, Johannes meminta KPK untuk menghormati lembaga persidangan yang ada. Selain itu, ia menduga, KPK sengaja tidak hadir dalam persidangan ini untuk mengulur-ulur waktu dan tidak memberikan keadilan bagi Kusnadi. **(Ful)-d**

Pemudik

“Kondisi tersebut belum banyak berubah sebagaimana yang terjadi pada pekan sebelumnya di bulan Maret yang lalu,” katanya.

Abdul Muhari menjabarkan, berdasarkan hasil prakiraan cuaca yang dilaporkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) diketahui Nusa Tenggara Timur (NTT) dan sekitarnya diprediksi dilanda hujan dengan intensitas tinggi dimulai pada 23-30 Maret. Sementara pada 25 Maret, cuaca serupa diperkirakan terjadi di Nusa Tenggara Barat (NTB). Kemudian di Jawa Barat dan Jawa Timur diperkirakan mengalami hujan lebat

Masjid

Di Gunungkidul, Masjid Al Ma’wa Putat Patuk menjadi salah satu contoh masjid yang siap menyambut pemudik dengan fasilitas lengkap, termasuk ruang menginap dan keamanan CCTV. Sementara itu, Masjid Al Musthofa Kerjo Ponjong terus berbenah dengan membuka TPA kedua dan bersiap menjadi pondok pesantren.

Di Kota Yogyakarta, Masjid Quwwatul Islam timur Malioboro dengan desain unik perpaduan budaya Yogya-Banjari menjadi daya tarik tersendiri. Fasilitas lift, eskalator dan parkir di *basement* membuat nyaman musafir yang singgah. Masjid Al Huda di Gedongkuning juga terkenal karena buka 24 jam dengan air minum isi ulang

Semarang

“Stasiun Pasar Senen dari 24 Maret, seperti prediksi kami sampai dengan 30 Maret itu, penumpang komposisinya sudah mencapai 100 persen,” kata Ixfan di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Senin (24/3).

Dikatakan, ada 396 Kereta Api Jarak Jauh yang dioperasikan di Pasar Senen

gratis dan rutin menggelar pesantren Ramadan.

Di Sleman juga tak ketinggalan dengan keunikan Masjid Qolbun Salim Baitul Khidmat di Berbah yang menyediakan lima kamar penginapan dan sajian kuliner kembul bersama usai salat Jumat. Masjid An Nurumi di Kalasan dengan arsitektur mirip Kremlin Rusia menjadi ikon yang banyak dikunjungi musafir, termasuk wisatawan mancanegara.

Untuk Kulonprogo, Masjid Nurul Huda Temon yang terletak di pintu masuk DIY dari Jawa Tengah selalu menjadi persinggahan favorit karena dekat dengan Bandara YIA dan dilengkapi fasilitas parkir luas serta kamar mandi difabel. Masjid

selama periode arus mudik, 21-30 Maret 2025. Dari jumlah tersebut, sebanyak 258.840 kapasitas kursi yang tersedia dan 249.640 tiket sudah terjual.

Menurutnya, ada 120 KAJJ tambahan yang disediakan untuk periode arus mudik itu, dengan total kapasitas kursi 64.184 kursi. “Tingkat okupansi 96 persen,”

Muqorobin di Brosot Galur, bahkan menyediakan aula pertemuan besar dan tiga kamar untuk menginap.

Sementara di Bantul, Masjid Mursyidullah di Pandak sering menjadi tujuan rombongan ziarah dengan bus besar. Masjid Al Husna Palbapang yang satu kompleks dengan Kantor Kalurahan terus membangun fasilitas secara swadaya. Masjid Syakirin di Jetis rutin mengadakan gotong royong kebersihan agar tetap nyaman bagi para musafir.

Kabid Urais Kanwil Kemenag DIY Sa’ban Nuron, menyampaikan apresiasi atas dedikasi para takmir dalam menjaga kemakmuran masjid dan memberi layanan terbaik kepada para musafir. **(Fie)-d**

katanya.

Dengan meningkatnya jumlah kereta api pada momen Lebaran 2025 ini, Ixfan mengimbau kepada masyarakat untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas, khususnya di persimpangan jalan raya dengan rel kereta api. Karena, mobilitas kereta api meningkat. **(Ant/San)-d**

Kudeta

nasib RUU lain yang lebih pro-rakyat, seperti RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, RUU Masyarakat Adat, dan RUU Perampasan Aset yang telah mangkrak bertahun-tahun.

Dalam Naskah Akademik yang beredar khususnya Bab II Kajian Teoritis dan Praktik Empiris bagian D yang menyangkut Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan diatur di dalam Undang-Undang terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek beban Keuangan Negara, dinyatakan: “Penempatan prajurit aktif TNI pada kementerian/lembaga lain sudah dilakukan atas kebijakan Presiden. Saat ini yang diperlukan adalah menguatkan dasar hukumnya di dalam UU TNI”. Pernyataan seperti ini dalam konteks Hukum Tata Negara disebut sebagai *post pactum* yakni situasi di mana suatu tindakan, kebijakan, atau legislasi dibuat setelah adanya suatu peristiwa politik tertentu, dengan tujuan untuk melegitimasi atau menyesuaikan keadaan yang telah terjadi sebelumnya. Dengan demikian dalam konteks perancangan peraturan Perundang-undangan, maka penempatan prajurit aktif TNI dalam rumusan UU TNI pada hakikatnya untuk memberikan legitimasi hukum atas kebijakan yang sudah dilaksanakan. Langkah legislasi yang demikian ini merupakan manifestasi dari legislative corruption atau dapat juga disebut sebagai *Gesetzgebungsverbrechen* (Kejahatan Legislasi) yang seharusnya tidak dilakukan dalam proses pembentukan Undang-Undang, karena dengan cara seperti ini jelas minim aspek meaningful participation (partisipasi bermakna) dalam proses pembentukan Undang-Undang sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan Naskah Akademik itulah, aspek paling

kontroversial dari revisi UU TNI adalah legalisasi penempatan prajurit aktif dalam jabatan sipil di 16 (enam belas) kementerian dan lembaga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1) dimana terjadi perluasan jabatan sipil yang dapat diisi prajurit aktif. Dalam UU 34 Tahun 2004 hanya terdapat 10 (sepuluh) jabatan sipil yang dapat ditempati oleh prejurit aktif. Melalui revisi UU TNI ini jumlah jabatan sipil tersebut bertambah menjadi 15 (lima belas). Perluasan ini merupakan bentuk penghianatan terhadap Pasal 30 UUD NRI 1945 yang secara eksplisit tegas dan jelas menyatakan bahwa TNI adalah alat negara yang tunduk pada kebijakan politik negara, yang bertugas mempertahankan, melindungi dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara, bukan pelaku politik itu sendiri. Bahkan dalam ayat (2) Pasal tersebut disebutkan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Poli.

Jika prajurit aktif dibiarkan mengisi jabatan-jabatan strategis di ranah sipil, maka reformasi TNI yang menegaskan pemisahan militer dan sipil menjadi omong kosong belaka. Ini adalah bentuk kudeta konstitusional yang tidak dilakukan dengan senjata, tetapi dengan pena undang-undang.

Pasal-pasal dalam revisi UU TNI berpotensi membangkitkan kembali “dwifungsi ABRI” dalam format yang lebih licik dan terselubung. Reformasi telah menetapkan bahwa militer harus kembali ke barak dan profesional dalam tugas pertahanan. Namun, UU ini justru membuka jalan bagi militer untuk kembali bercokol dalam struktur pemerintahan, sehingga konsep supremasi sipil menjadi ilusi belaka.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa keterlibatan militer dalam birokrasi pemerintahan di masa lalu telah melahirkan abuse of power, korupsi struktural, serta represi terhadap masyarakat sipil. Dengan membuka jalan bagi

Sambungan hal 1

cua sebelum dan selama perjalanan agar dapat menentukan rute yang lebih aman. Pemudik yang melintasi daerah rawan bencana, seperti jalur pegunungan atau kawasan dengan potensi longsor dan banjir, disarankan untuk meningkatkan kewaspadaan.

BNPB memastikan pihaknya telah berkoordinasi dengan berbagai lembaga terkait guna mengantisipasi potensi dampak cuaca ekstrem terhadap arus mudik Lebaran. Masyarakat diharapkan tetap berhati-hati dan mengikuti arahan dari pihak berwenang demi perjalanan yang aman dan lancar. **(Ant/San)-d**

Sambungan hal 1

Sambungan hal 1

2 Sekolah Rakyat Akan Didirikan di Magelang

MAGELANG (KR) - Di Kabupaten Magelang akan didirikan dua Sekolah Rakyat, keduanya berada di Kecamatan Salaman, yaitu di Sentra Antasena dan Tegalrejo. Yang di Antasena Salaman tinggal revitalisasi sedikit. Yang di Tegalrejo direvitalisasi, dari DPU sudah melakukan pengecekan.

“Dan itu sekolah untuk orang-orang miskin, di Desil 1 dan Desil 2,” kata Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono saat melakukan kunjungan dan silaturahmi ke Desa Purwosari, Salaman, Senin (24/3).

Wamensos juga menyerahkan bantuan kepada warga Purwosari berupa 250 paket sembako senilai Rp 37,5 juta, bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (Atensi) untuk 96 penerima manfaat senilai Rp



KR-M Thoha

Wamensos saat menyerahkan bantuan kepada warga.

96 Juta, dan bantuan alat bantu disabilitas bagi 6 penerima manfaat berupa kursi roda, tongkat bagi penyandang disabilitas netra dan tongkat untuk lanjut usia.

Agus Jabo mengatakan, Sekolah Rakyat tersebut nantinya berbentuk boarding. Anak-anak akan dididik

tidak hanya memiliki kapasitas keilmuan, tetapi juga memiliki karakter kebangsaan yang hebat. Diharapkan nantinya bisa menjadi leader. Ini, lanjutnya, sebagai perintah Presiden untuk memotong atau memutus transmisi kemiskinan yang ada di Indonesia. **(Tha)-d**

Tim Garuda

karena satu tiket otomatis ke Piala Dunia dari Grup C sudah dikunci Timnas Jepang. Sementara untuk posisi kedua saat ini kokoh ditempati Australia yang mengemas 10 poin, sedangkan Timnas Indonesia dengan 6 poin, masih berpeluang lolos via Ronde 4 asalkan mampu bertahan di posisi ketiga atau keempat klasemen akhir Grup C.

Demi mengejar target lolos tersebut, Timnas Indonesia wajib meraih kemenangan saat menjalani dua laga kandang kontra Bahrain dan China. “Saya pikir kami memulai dengan baik di Australia. Kami memiliki kontrol total dalam pertandingan. Karena kami membuat kesalahan sendiri, mereka menang. Mari berharap untuk hasil yang lebih baik terhadap Bahrain,” kata Calvin Verdonk dikutip dari laman resmi PSSI.

Meski mengincar kemenangan demi menguatkan peluang lolos ke Piala Dunia, perjuangan Indonesia jelas tidaklah mudah. Pasalnya, di laga ini tim besutan pelatih Patrick Kluivert berpotensi tidak diperkuat pemain terbaik setelah Mees Hilgers absen karena cedera. Sebagai ganti, Kluivert memiliki sejumlah pilihan pemain lain yang bisa diandalkan seperti Rizki Ridho, Justin Hubner, Jordy Amat, hingga Muhammad Ferrari.

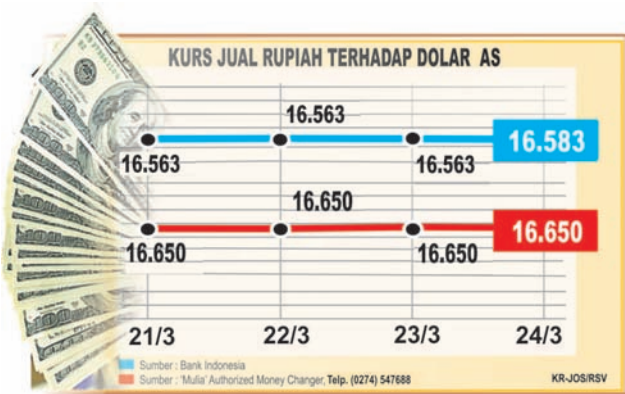
Tak hanya terkendala masalah Mees Hilgers yang absen, tantangan lainnya adalah datang dari rekor pertemuan kedua negara yang hingga saat ini memang lebih didominasi Bahrain. Sejak tahun

PM Korsel

Mosi pemakzulan terhadap Han disahkan oleh

Majelis Nasional yang dipimpin oleh pihak oposisi pada 27 Desember tahun lalu, menyusul pemakzulan Yoon pada 14 Desember terkait pemberlakuan darurat militer yang gagal. Choi Sang-mok, menteri ekonomi dan keuangan Korsel yang merangkap sebagai wakil perdana menteri untuk

urusan ekonomi, menjadi penjabat presiden pada Desember tahun lalu usai pemakzulan Yoon dan Han. Yoon mengumumkan darurat militer pada 3 Desember malam tahun lalu, tetapi beberapa jam kemudian deklarasi tersebut dicabut oleh Majelis Nasional Korsel. **(Ant/Has)-d**



Prakiraan Cuaca Selasa, 25 Maret 2025					
Lokasi	Cuaca			Suhu C	Kelembaban
Bantul	Pagi	Siang	Malam	22-30	65-95
Sleman	Pagi	Siang	Malam	22-29	65-95
Wates	Pagi	Siang	Malam	22-29	65-95
Wonosari	Pagi	Siang	Malam	22-30	65-95
Yogyakarta	Pagi	Siang	Malam	22-30	65-95
☀️ Cerah ☁️ Berawan 🌧️ Udara Kabin 🌧️ Hujan Lokal 🌧️ Hujan Petir					

Grafis : Aiko

Efisiensi Anggaran Pemerintah: Apa Urgensinya?



Ferri Wicaksono, SIP MA
Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ekonomi dan Sosial
Universitas Amikom Yogyakarta

EFISIENSI anggaran pemerintah menjadi salah satu isu paling krusial jika dilihat dari perspektif manajemen keuangan publik, terutama dalam konteks pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam lingkup anggaran yang terbatas tersebut, pemerintah diharapkan dapat mengelola sumber daya sedemikian rupa sehingga manfaat maksimum dapat disampaikan kepada masyarakat. Pentingnya

efisiensi anggaran tidak hanya berkaitan dengan penghematan, tetapi juga dengan efektivitas dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik. Makalah ini akan membahas alasan perlunya ekonomi dana anggaran pemerintah dan dampak sosial-ekonomi dari ekonomi ini terhadap masyarakat.

Mengapa Efisiensi Anggaran Diperlukan?
Efisiensi anggaran tidak dapat dipahami sekadar sebagai pengurangan belanja, tetapi sebagai pendekatan terbaik dalam penempatan sumber daya yang menghasilkan keluaran yang diinginkan. Alasan utama perlunya efisiensi anggaran adalah sebagai berikut:

a. Mempertahankan Stabilitas Fiskal. Pemerintah harus memastikan keseimbangan antara pendapatan dan belanja negara. Tanpa efisiensi anggaran, defisit fiskal dapat keluar kendali yang menyebabkan peningkatan pinjaman dan ketidakstabilan

ekonomi. Contoh kasus di Yunani dan Argentina, di mana pengeluaran fiskal yang tidak terkendali menyebabkan inflasi yang signifikan, diikuti oleh penurunan drastis nilai mata uang.

b. Mengurangi Pemborosan dan Korupsi. Salah satu masalah terpenting dalam manajemen anggaran adalah kebocoran akibat korupsi dan pemborosan. Melalui pemantauan yang cermat dan pelaksanaan efisiensi, potensi penyalahgunaan anggaran dapat dikurangi.

c. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. Efisiensi anggaran memungkinkan pemerintah untuk mengalokasikan dana dengan cara yang lebih terarah ke area prioritas seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur yang meningkatkan kualitas layanan kepada publik.

d. Meningkatkan Daya Saing Ekonomi. Anggaran yang dikelola dengan efisien memungkinkan peningkatan investasi dalam infrastruktur dan inovasi yang

meningkatkan daya saing suatu negara di panggung global.

Dampak Positif Efisiensi Anggaran
Jika diterapkan dengan tepat, efisiensi anggaran menjanjikan sejumlah manfaat bagi negara dan warganya, seperti:

a. Peningkatan Kepercayaan Publik. Manajemen anggaran yang transparan dan akuntabel meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

b. Efektivitas Program Pembangunan. Anggaran yang efisien memungkinkan pemerintah untuk memastikan bahwa program pembangunan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan warga.

c. Mengurangi Beban Fiskal di Masa Depan. Menghindari pengeluaran yang boros saat ini maka akan mengurangi beban fiskal generasi mendatang, yang membantu menjaga keuangan Negara.

Tantangan dalam Penerapan Efisiensi Anggaran

Meskipun memiliki keuntungan, efisiensi anggaran juga memiliki potensi tantangan, seperti:

a. Resistensi dari Birokrasi. Perubahan dalam pola anggaran sering kali menjadi yang paling kontroversial dengan birokrasi yang telah terbiasa dengan sistem lama. Solusi yang dapat diterapkan adalah melatih dan memotivasi para birokrat terkait untuk lebih mau melakukan perubahan.

b. Risiko Pemotongan Berlebihan. Perencanaan efisiensi yang buruk dapat menyebabkan pengurangan layanan penting. Misalnya, penerapan anggaran berbasis kinerja yang mencoba menyeimbangkan efisiensi dan layanan publik yang diperlukan.

c. Kendala Teknis dan Administratif. Harus ada dukungan administratif yang kuat untuk memastikan efisiensi, serta teknologi yang mendukung yang menjamin transparansi dan akurasi dalam

pelaksanaan anggaran. Misalnya, penggunaan sistem e-budgeting yang membantu dalam pengelolaan dana publik secara transparan dan akurat.

Strategi Implementasi Efisiensi Anggaran

Untuk memastikan efisiensi anggaran dapat berjalan optimal, beberapa Tindakan dapat diambil, diantaranya:

a. Evaluasi Kinerja Program. Setiap program harus dievaluasi secara berkala berdasarkan efektivitas dan dampaknya bagi masyarakat.

b. Digitalisasi Manajemen Keuangan. E-budgeting dan teknologi digital lainnya akan meningkatkan transparansi dan mengurangi kemungkinan penyalahgunaan dana.

c. Peningkatan Partisipasi Publik. Adanya partisipasi publik dalam pengawasan anggaran, akan memastikan bahwa sumber daya yang disediakan digunakan sesuai dengan prioritas yang telah ditentukan sebelumnya.



Oleh karena itu, urgensi efisiensi anggaran pemerintah bukan hanya berkaitan dengan penghematan, tetapi juga menyangkut peningkatan efisiensi serta transparansi pengelolaan keuangan negara. Dengan menerapkan strategi yang sesuai, pemerintah mempunyai peluang untuk mengoptimalkan dana tersebut guna kelangsungan hidup masyarakat, menjaga stabilitas fiskal, serta memfasilitasi pertumbuhan ekonomi yang stabil.

Namun demikian, efisiensi anggaran tersebut harus diterapkan dengan cermat, mengingat keanekaragaman potensi riset seperti kebijakan yang merugikan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, efisiensi kinerja, digitalisasi, serta partisipasi masyarakat sejauh ini menjadi komponen utama dalam mencapai efisiensi anggaran jangka panjang.